

Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa Indonesia

Faisal Galih Setyadi¹, Indra Ardiyansah², Muhamad Ifan Nur Rohkim³

¹²³ Vocational school, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding Authors: faisalgalih1224@student.uns.ac.id indraardiyansah@student.uns.ac.id
muhamadifan_07@student.uns.ac.id

Abstrak: Pancasila merupakan nilai ideologi yang paling tinggi dibandingkan ideologi lainnya. Bahkan ia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Krisis identitas yang melanda Indonesia saat ini, merupakan salah satu wujud melemahnya nilai-nilai ideologi Pancasila, disebabkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap penerapan Pancasila sebagai modal sosial bernegara dan berbangsa. Kapitalisme dan fundamentalisme muncul sebagai wujud lemahnya jati diri bangsa. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, seperti munculnya kasus separatis dan korupsi. Kerusakan atau konflik berskala kecil maupun perorangan dapat berkembang menjadi konflik terhadap SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum. Sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, ideologi Pancasila mempunyai peranan yang sangat berbeda. Era Orde Lama merupakan awal lahirnya Pancasila dan pada masa Orde Baru Pancasila dijadikan untuk mempertahankan kekuasaan, dan Reformasi dimana penghayatan nilai-nilai Pancasila semakin memudar karena ketidakpercayaan sehingga memunculkan kecurigaan. Saran untuk meminimalisir krisis jati diri bangsa adalah dengan menyadarkan akan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Kita harus kembali pada nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya.

Kata Kunci: ideologi; kepercayaan; modal sosial; Pancasila

1. Pendahuluan

Pancasila adalah pondasi ideologi dan nilai-nilai yang menjadi identitas fundamental bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kita akan membahas mengapa Pancasila sangat penting sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan kesatuan dalam keragaman. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam etnis, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila menggarisbawahi pentingnya persatuan di tengah keragaman ini. Pancasila juga menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Ini berarti melindungi hak asasi manusia,

mempromosikan keadilan sosial, dan menerapkan pemerintahan yang berdasarkan musyawarah dan perwakilan. Selain itu, Pancasila memberikan landasan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, serta pengembangan budaya yang mencerminkan martabat dan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai Pancasila juga membantu Indonesia dalam hubungan internasional. Mereka menciptakan dasar moral bagi diplomasi dan kemitraan dengan negara-negara lain.

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebuah ideologi formal, tetapi juga merupakan identitas dan nilai-nilai yang memberi arah bagi seluruh bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks global yang terus berubah, Pancasila tetap menjadi panduan yang relevan dan esensial bagi masa depan bangsa Indonesia. Selain itu Pancasila mengandung lima prinsip atau nilai luhur yang menjadi identitas bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila mengakui keberagaman agama dan keyakinan, namun menekankan pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan budaya yang beradab dalam masyarakat.
3. Persatuan Indonesia, Mendorong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, mengatasi perbedaan etnis, agama, dan budaya.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Menegaskan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Memastikan pemerataan ekonomi, kesempatan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila menjadi identitas dan nilai luhur bangsa Indonesia karena menggambarkan landasan filosofis dan moral yang mengikat seluruh warga negara dalam keragamannya. Ini mendorong persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, sambil menjaga keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia.

2. Pembahasan

Pancasila sebagai identitas mengacu pada peran dan makna Pancasila dalam mendefinisikan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekadar seperangkat prinsip ideologi, melainkan menjadi simbol dari kebanggaan, kesatuan, dan ciri khas nasional Indonesia. Identitas Pancasila mencakup beberapa aspek:

- a. Pancasila adalah salah satu hal yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain. Hal ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi inti budaya dan karakter bangsa Indonesia.

- b. Pancasila mencerminkan keberagaman budaya, etnis, agama, dan keyakinan yang ada di Indonesia. Identitas Pancasila menghormati dan menggabungkan keberagaman ini dalam satu kesatuan nasional.
- c. Pancasila membantu warga Indonesia memahami dan meresapi jati diri mereka sebagai bangsa yang menghargai toleransi, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Ini menciptakan rasa solidaritas dan identitas nasional.
- d. Pancasila berfungsi sebagai perekat sosial yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dalam semangat persatuan dan gotong royong.

Sedangkan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa adalah konsep bahwa Pancasila bukan hanya sebuah ideologi politik, tetapi juga merupakan seperangkat nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari identitas dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai pondasi budaya dan moral yang membimbing tindakan dan sikap individu serta masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai nilai luhur bangsa, PANCASILA mendorong kesatuan, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat. Ini juga menjadi panduan dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan sosial. PANCASILA merangkul keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia, yang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat

I. Pancasila sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa

Pancasila adalah pilar utama dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Itu memadukan keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa dalam satu kesatuan yang kuat.

Pancasila diamanatkan sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945. Ini mencerminkan komitmen negara untuk mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dalam pembangunan dan pengelolaan negara

Pancasila adalah panduan moral dan etika bagi warga negara Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan menjadi landasan bagi perilaku individu dan masyarakat.

Pancasila mendorong perdamaian dan toleransi antaragama dan antarbudaya. Ini penting dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni di Indonesia.

Pancasila memberikan landasan untuk perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

II. Pancasila sebagai Wujud Modal Sosial Bangsa

Pancasila menciptakan landasan bagi kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong dan persatuan adalah bagian integral dari Pancasila, yang mempromosikan kerja sama antarindividu dan kelompok.

Pancasila juga merangkul keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa, sehingga menciptakan modal sosial yang memungkinkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.

Nilai-nilai keadilan sosial yang tertanam dalam Pancasila membantu menciptakan modal sosial yang mendorong perhatian terhadap kesejahteraan bersama dan peningkatan kualitas hidup bagi semua warga negara.

Pancasila mendukung sistem demokrasi di Indonesia dan mempromosikan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Ini menciptakan modal sosial dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara.

Nilai-nilai moral dan etika Pancasila, seperti integritas dan tanggung jawab, menciptakan modal sosial yang mendukung hubungan positif antarindividu, organisasi, dan kelompok dalam masyarakat

III. Krisis Identitas dalam Kehidupan Berbangsa

Globalisasi membawa pengaruh luar yang kuat ke dalam budaya dan nilai-nilai lokal. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menjaga identitas dan nilai-nilai tradisional dalam dunia yang semakin terhubung.

Perbedaan budaya dan agama dalam masyarakat dapat menyebabkan konflik identitas, terutama jika pihak-pihak yang berbeda tidak bisa mencapai kesepakatan atau harmoni.

Perubahan sosial dan ekonomi, seperti urbanisasi dan modernisasi, bisa mengubah pola hidup dan nilai-nilai tradisional, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana beradaptasi dengan perubahan ini tanpa kehilangan identitas budaya.

Politik identitas seringkali digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Ini bisa menciptakan konflik dan ketidakpastian dalam menentukan identitas dan kesetiaan terhadap kelompok tertentu.

Ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi dapat membuat sebagian masyarakat merasa terpinggirkan atau tidak diakui dalam identitas nasional, yang memicu krisis identitas.

IV. Korupsi sebagai Wujud Krisis Identitas Bangsa

Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini bisa menciptakan rasa pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan sistem hukum. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap bangsa dan negara, menggoyahkan identitas nasional.

Korupsi dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial, di mana hanya segelintir orang atau kelompok yang mendapatkan keuntungan, sedangkan sebagian besar masyarakat merasakan dampak negatif. Hal ini bisa menciptakan perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan, yang dapat merongrong identitas bangsa.

Korupsi seringkali berkaitan dengan praktik buruk dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Ini dapat menyebabkan krisis kepemimpinan dan meragukan kemampuan

negara untuk memimpin dan mewakili nilai-nilai nasional.

Korupsi menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan dan merugikan identitas nasional sebagai negara yang peduli terhadap kesejahteraan warganya.

V. Fundamentalisme Agama sebagai akibat Lemahnya Pengamalan Nilai Ideologi Pancasila

Ketika nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan, tidak terwujud dalam praktiknya, masyarakat mungkin merasa tidak puas dan mencari alternatif. Fundamentalisme agama bisa menjadi cara bagi sebagian orang untuk mencari solusi atas ketidakpuasan tersebut.

Jika nilai-nilai ideologi Pancasila tidak diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa menciptakan kekosongan nilai. Agama mungkin menjadi sumber nilai dan etika yang lebih kuat bagi individu.

Krisis identitas dalam masyarakat, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksetaraan, globalisasi, dan konflik budaya, bisa memunculkan fundamentalisme agama sebagai cara untuk merespons perasaan kebingungan identitas.

Kurangnya pendidikan atau akses terhadap informasi yang beragam bisa memicu persepsi sempit dan fundamentalisme agama. Dalam kasus ini, nilai-nilai ideologi Pancasila mungkin tidak tersampaikan atau dipahami dengan baik

3. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan dan analisis dari berbagai kasus di atas, dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut UUD 1945 mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara, di samping itu Pancasila juga mempunyai peran dalam membentuk identitas dan nilai luhur bangsa. Pancasila mempunyai ciri khas yang melekat pada tubuh masyarakat Indonesia. Pancasila yang terdapat pada salah satu dari 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan perwujudan modal sosial (social capital), alasannya karena salah satu wujud modal sosial yaitu trust (kepercayaan) yang membangun jati diri bangsa Indonesia kepada sebuah kondisi dimana mereka mempunyai satu rasa dan senasib pada masa penjajahan hingga saat ini. Hal tersebut tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tanpa adanya Pancasila sebagai modal sosial, maka perwujudan menjadi sebuah bangsa yang bebas dan besar sangat kecil kemungkinannya akan terwujud. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sebagai akibat melemahnya identitas bangsa (krisis identitas) maka timbullah paham kapitalis dan fundamentalis. Akibatnya banyak kasus yang terjadi seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, gerakan sparatis agama, dan lain sebagainya yang meresahkan masyarakat. Adanya konflik individu yang berbaur menjadi sebuah konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) itu yang menandakan melemahnya

kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Krisis identitas yang ditandai dengan krisis moral juga ikut andil dalam melemahnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial.

Referensi

- Atmasasmitha. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Maju Mundur.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Bisri, Ilham. 2008. *Sistem Hukum Prudensia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- Dhont, Frank, dkk. 2010. *Pancasila's Contemporary Appeal: Re-legitimizing Indonesia's Founding Ethos*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Douglas, Stephen. 1974. *Student Activism in Indonesia*. Boston: The Little, Brown and Company.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust, The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Ir. Soekarno. 2006. *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno (Penyunting: Floriberta Aning)*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Kaelan. 2008. *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Nurdjana, Igm. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putnam, Robert. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Rahma, Srijanti A dan Purwanto S. K. 2008. *Etika Berwarga Negara: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat.
- S, Ubed Abdilah. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesiatara.
- Soegito, A. T, dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Pusat Pengembangan MKUMKDK Unnes.
- Suwarno, P. J. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.